

Social Safety Net dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Palembang

Kamalia Sani¹, Dinnul Alfian Akbar², Rinol Sumantri³

¹ UIN Raden Fatah Palembang; kamaliasani@yahoo.com

² UIN Raden Fatah Palembang; dinnulalfianakbar_uin@radenfatah.ac.id

³ UIN Raden Fatah Palembang; rinolsumantri_uin@radenfatah.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Social Safety Net;
Pemberdayaan;
UMKM.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Jaring Pengaman Sosial dalam pemberdayaan UMKM serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program *Social Safety Net* (Jaring Pengaman Sosial) efektif dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Kamalia Sani

UIN Raden Fatah Palembang; kamaliasani@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Sampai dengan 18 Maret 2020, Covid-19 telah menyebar ke 159 negara dan merenggut lebih dari 4.000 korban jiwa. Penyebaran tidak hanya ke Asia seperti Korea Selatan, Singapura, dan Iran, tetapi juga sudah meluas ke Eropa, dengan penyebaran tertinggi di Italia, dan Amerika Serikat. Badan Kesehatan Dunia – PBB (World Health Organization – United Nation) pada 11 Maret 2020 bahkan sudah menyatakan Covid-19 menjadi pandemik dunia yang perlu penanganan serius. Angka penyebaran Covid-19 di luar Tiongkok yang mencapai 13 kali lipat dan jumlah negara terdampak yang menjadi tiga kali lipat dalam waktu dua minggu, menjadi pertimbangan WHO dalam penetapan Covid-19 menjadi pandemic (Hartanti et al., 2019).

Situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Tantangan diartikan, perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya. Peluang diartikan, solusi jangka pendek perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi. Ada beberapa solusi jangka pendek untuk tetap menjaga eksistensi UMKM. Menurut OECD, beberapa solusi perlu dipertimbangkan untuk dilakukan yakni: protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM, penundaan pembayaran hutang

atau kredit untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM, bantuan keuangan bagi UMKM dan kebijakan structural (Pakpahan, 2020a, 2020b).

Salah satu program yang dijalankan pemerintah sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM adalah program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) (Indonesia, 2020).

Permasalahan mendasar saat ini adalah kesejahteraan sosial, maka pemerintah hadir dengan program yang berusaha menyentuh langsung terhadap masyarakat sebagai jawaban atas masalah tersebut. Banyak program yang secara khusus digulirkan untuk mengatasi problematika sosial akibat pandemi covid-19 sebagai keseriusan pemerintah (Wiyono, 2020).

Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat memperpanjang napas dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia (Indonesia, 2020).

Banyak dampak yang ditimbulkan dari perkembangan virus ini termasuk membuat perekonomian masyarakat sulit bergerak dan menimbulkan kepanikan dari masyarakat terutama mereka yang bekerja sebagai buruh dan bekerja di sektor swasta, kekhawatiran kehilangan pekerjaan dan terjadinya pengurangan karyawan hingga PHK pada perusahaan swasta akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, bantuan pemerintah dianggap sangat diperlukan untuk bertahan hidup khususnya bagi masyarakat yang rentan ekonomi dalam masa pandemi seperti Covid-19 saat ini.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Palembang, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta UMKM penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial. Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dapat dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan UMKM Di Kota Palembang

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Sumatera Selatan. Jumlah UMK di Sumatera Selatan sangat besar, mencapai 98,99 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang ada di Sumatera Selatan, sedangkan usaha menengah besar (UMB) hanya 1,01 persen saja. Besarnya persentase jumlah UMK di Sumatera Selatan menunjukkan UMK masih mampu bertahan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan rakyat dengan jumlahnya yang sangat besar dan sifatnya yang umumnya padat karya dan banyak menggunakan bahan baku lokal dan juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar pula.

Jenis UMK terbanyak bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yaitu 51,80 persen. Kegiatan ini banyak digeluti terutama perdagangan eceran karena mudah dijalankan, tidak membutuhkan modal yang besar, tidak memerlukan tempat khusus dan tidak memerlukan administrasi pengurusan usaha. Jumlah UMK terbesar kedua di Sumatera Selatan yaitu UMK yang bergerak di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum (14,59%). Sektor ini kian berkembang ditengah semakin antusiasnya pemerintah daerah meningkatkan potensi pariwisata di Sumatera Selatan. Kemajuan pariwisata sangat didukung oleh tersedianya jasa akomodasi dan penyediaan makan dan minum yang layak untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Sumatera Selatan. Selain itu, keanekaragaman kuliner Sumatera Selatan juga menjadi daya tarik kunjungan wisata dan potensi pengembangan usaha kuliner (Indonesia, 2020).

Pandemi Covid-19 yang memiliki efek cukup panjang di tahun 2020 lalu membuat membludaknya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Dr Mega Nugraha mengatakan, jumlah UKM yang terdata melonjak drastis dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2019 ada 162 ribu UKM, kemudian di tahun 2020 lalu per Desember sudah 427 ribu UKM. Artinya sudah dua kali lipat bertambah, paling banyak penambahan di Kota Palembang dan di daerah sekitarnya (Oktareza, 2021).

Di Kota Palembang setidaknya sekitar 30 ribu UMKM terdampak penurunan produktivitas dan pelemahan ekonomi termasuk kebutuhan modal usaha yang tak tercukupi karena dampak Covid-19. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, Ana Heriana melalui Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro, Juanaria, menjelaskan, semua UMKM baik skala kecil maupun besar mengalami penurunan omzet bahkan ada yang tidak mendapatkan pemasukan sama sekali sejak pandemi Covid-19.

"Pendataan 2019 lalu, pelaku UMKM ada 37.902 dari berbagai sektor kuliner, kerajinan, fashion, dan jasa. Semua kena dampak, tetapi untuk jumlah pasti kita belum mendata rinci, yang jelas semua UMKM di bawah naungan kami pastikan telah merasakan dampaknya."

Juanaria mengatakan, alasan utama UMKM di Palembang terdampak lantaran tidak adanya event atau acara yang berlangsung, akibat ada pembatasan di awal pandemik Covid-19. Untuk memberikan gairah dan membangkitkan lagi semangat para pelaku UMKM, saat memasuki kehidupan normal baru ini, pihaknya mengambil langkah memfasilitasi kebutuhan UMKM dengan mendistribusikan bantuan langsung dari pemerintah pusat untuk UMKM yang berhak menerima sesuai persyaratan.

"Ini supaya UMKM bangkit, penyaluran kita awasi meski lewat pengiriman perbankan ke rekening masing-masing. Palembang ada sekitar 12.202 UMKM mendapatkan jatah bantuan sebesar Rp2,4 juta. Mereka yang benar-benar butuh, secara detail yang tahu pihak bank penyalur,"

Selain bantuan dari Presiden, UMKM terdampak juga menerima keringanan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tahun ini ditarget 4000 UMKM, tahun lalu terealisasi 4.020. Setiap pedagang atau UMKM mendapatkan pinjaman masing-masing Rp3 juta dan persoalan biaya bunga disubsidi oleh Pemkot Palembang. Sehingga UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain dengan usaha tersebut.

Bagi UMKM yang ingin mengajukan pinjaman ke BPR, daftar langsung ke kelurahan, kecamatan, dan Dinas Koperasi. Nantinya BPR bakal melakukan survei. Kemudian bank menentukan, apakah diterima. Meskipun mereka tidak memiliki BI checking tidak ada masalah sebagaimana dikatakan Ana Heriana:

"Syaratnya tinggal lakukan pengajuan, dengan tetap berproses, persiapkan saja dan jangan takut untuk sharing ke kami (Dinas Koperasi dan UMKM)."

Tab 1. Data Perkembangan UKM Per Kecamatan Kota Palembang Sampai Dengan Tahun 2020

No	Kecamatan	Unit Usaha			Total Unit Usaha
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Ilir Barat I	732	1.958	402	3.092
2	Bukit Kecil	652	1.258	258	2.168
3	Ilir Barat II	689	1.478	299	2.466
4	Gandus	464	682	119	1.265
5	Sukarami	1.299	3.259	712	5.270
6	Kemuning	545	1.113	212	1.870
7	Ilir Timur I	1.353	3.997	963	6.313

8	Alang-alang Lebar	529	1.041	201	1.771
9	Iilir Timur II	934	2.462	591	3.987
10	Iilir Timur III	679	1.221	222	2.122
11	Kalidoni	521	1.026	120	1.667
12	Sako	719	1.606	318	2.643
13	Sematang Borang	462	684	134	1.280
14	Seberang Ulu I	670	1.229	302	2.201
15	Kertapati	455	563	96	1.114
16	Seberang Ulu II	923	2.094	445	3.462
17	Jakabaring	575	1.175	176	1.926
18	Plaju	454	629	127	1.210
Jumlah		12.655	27.475	5.697	45.827

Sumber: Dinas Koperasi Kota Palembang, 2020

3.2. Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Palembang

Salah satu penggerak kebangkitan UMKM di Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19 ini adalah program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara kumulatif, empat klaster program yang menjadi fokus Satgas PEN yaitu sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D) serta pembiayaan koperasi yang mencapai realisasi Rp. 277,68 Triliun pada minggu pertama kuartal IV tahun 2020.

Salah satu program Jaring Pengaman Sosial PEN yang sedang dilaksanakan saat ini dengan target utama penerimanya pelaku UMKM adalah Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp.2,4 juta kepada pelaku UMKM memberi hasil positif untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usaha para pelakunya. Program yang diluncurkan pada Agustus 2020 ini sudah tersalurkan 100% pada bulan Oktober lalu kepada 9 juta target penerima manfaat yakni, pengusaha mikro yang utamanya belum tersentuh layanan perbankan. Pemerintah pun menambah jumlah pelaku usaha mikro penerima manfaat BPUM tersebut hingga total keseluruhannya menjadi 12 juta UMKM (Indonesia, 2020).

Kasi Peningkatan KK Dinas Koperasi, Devi Anggraini, mengatakan Pemkot Palembang menargetkan 5000 UMKM seluruh Palembang di 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan, akan mendapatkan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp.2,4 juta kepada pelaku UMKM. Ditambah dengan program bantuan modal tanpa bunga dan agunan mulai dari penjual pempek, gorengan, mie tek-tek, siomay, bakso dan termasuk pedagang di pasar. Setiap pedagang atau UMKM mendapatkan pinjaman masing-masing Rp.3 juta dan persoalan biaya bunga disubsidi oleh Pemkot Palembang. Tujuan program bantuan ini adalah untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usaha para pelakunya, sehingga UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain dengan usaha tersebut.

Berdasarkan data perkembangan UMKM di Kota Palembang selama periode lima tahun dari 2016 sampai dengan 2020 pada Tabel berikut ini, maka akan dapat diketahui sejauhmana efektivitas dan kontribusi penerapan kebijakan program Jaring Pengaman Sosial PEN melalui program bantuan modal usaha dari Presiden serta bantuan keringanan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan UMKM selama masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang.

Tabel 2. Data Perkembangan UMKM di Kota Palembang Periode Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun														
			2016	Naik/Turun			Naik/Turun			Naik/Turun			Naik/Turun				
				2017	Satuan	%	2018	Satuan	%	2019	Satuan	%	2020	Satuan	%		
1	Jumlah UMKM	Unit	36.101	36.601	500	1.4	37.101	500	1.3	37.902	801	2.1	45.827	7.925	17.3		
	Pengusaha Mikro dan Kecil	Unit	30.625	31.071	446	1.4	31.561	490	1.6	32.285	724	2.2	40.130	7.845	19.5		
	Pengusaha Menengah	Unit	5.476	5.530	54	1.0	5.540	10	0.2	5.617	77	1.4	5.697	80	1.4		
2	Modal Kerja dan Investasi (aset)	Rp.Jt	9.077.403	11.339.403	2.262.000	19.9	12.009.584	670.181	5.6	14.216.000	2.206.416	15.5	15.806.130	1.590.130	10.1		
	Pengusaha Mikro dan Kecil	Rp.Jt	3.734.884	4.394.009	659.125	15.0	5.054.134	660.125	13.1	6.192.050	1.137.916	18.4	7.667.900	1.475.850	19.2		
	Pengusaha Menengah	Rp.Jt	5.342.519	6.945.394	1.602.875	23.1	6.955.450	10.056	0.1	8.023.950	1.068.500	13.3	8.138.230	114.280	1.4		
3	Omzet	Rp.Jt	25.559.345	27.614.510	2.055.165	7.4	28.157.650	543.140	1.9	31.090.860	2.933.210	9.4	34.534.475	3.443.615	10.0		
	Pengusaha Mikro dan Kecil	Rp.Jt	10.554.862	11.556.782	1.001.920	8.7	12.056.800	500.018	4.1	13.390.060	1.333.260	10.0	16.581.525	3.191.465	19.2		
	Pengusaha Menengah	Rp.Jt	15.004.483	16.057.728	1.053.245	6.6	16.100.850	43.122	0.3	17.700.800	1.599.950	9.0	17.952.950	252.150	1.4		
4	Penyerapan Tenaga Kerja	Org	142.122	149.586	7.464	5.0	150.616	1.030	0.7	153.173	2.557	1.7	186.217	33.044	17.7		
	Pengusaha Mikro dan Kecil	Org	117.689	124.093	6.404	5.2	125.073	980	0.8	127.245	2.172	1.7	159.920	32.675	20.4		
	Pengusaha Menengah	Org	24.433	25.493	1.060	4.2	25.543	50	0.2	25.928	385	1.5	26.297	369	1.4		
Rataan persen peningkatan/pemurunan dari tahun sebelumnya (2016 – 2017)						8.4	(2017 – 2018)			2.4	(2018 – 2019)			7.2	(2019 – 2020)		13.8

Sumber: Dinas Koperasi Kota Palembang, 2020

Berdasarkan data perkembangan UMKM di Kota Palembang selama periode lima tahun dari 2016 sampai dengan 2020 pada Tabel di atas, menunjukkan bahwa secara umum jumlah UMKM setelah diberlakukannya kebijakan pemberdayaan UMKM melalui program Jaring Pengaman Sosial PEN dengan program bantuan modal usaha dari Presiden serta bantuan keringanan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, mengalami peningkatan yang tinggi daripada tahun 2019 yang berjumlah 37.902 unit usaha. Pada tahun 2020 ini jumlah unit usaha UMKM yang terdiri dari unit usaha mikro dan kecil serta unit usaha menengah meningkat sebesar 17,3 persen dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 45.827 unit usaha.

Peningkatan terbanyak adalah pada pelaku UMKM pada golongan pengusaha mikro dan kecil yaitu sebanyak 40.130 unit usaha. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah unit usaha sebesar 19,5 persen atau 7.845 unit usaha lebih banyak dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 32.285 unit usaha. Sedangkan perkembangan jumlah unit usaha menengah tidak terjadi peningkatan yang berarti dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 ini jumlah usaha golongan menengah adalah sebanyak 5.697 unit, atau hanya mengalami peningkatan sebesar 1,4 persen (80 unit) dibandingkan tahun 2019 (5.617 unit).

Seiring dengan adanya peningkatan pada jumlah unit usaha UMKM saja, kondisi tersebut juga berdampak terhadap peningkatan pada semua unsur yang terkait didalamnya yaitu sisi modal kerja dan investasi (aset), omzet, penyerapan tenaga kerja, terutama pada golongan pelaku unit usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2020 ini sisi modal kerja dan investasi (aset) unit usaha mikro dan kecil adalah sebesar Rp. 7.667.900 (juta). Artinya, mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen atau Rp. 1.475.850 (juta) lebih tinggi daripada tahun 2019 yaitu Rp. 6.192.050 (juta). Pada sisi omzet unit usaha mikro dan kecil meningkat menjadi sebesar Rp. 16.581.525 (juta). Artinya, mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen atau Rp. 3.191.465 (juta) lebih tinggi daripada tahun 2019 yaitu Rp. 13.390.060 (juta).

Peningkatan tertinggi unit usaha mikro dan kecil pada tahun 2020 ini adalah pada sisi penyerapan tenaga kerja. Berkembangnya jumlah unit usaha UMKM juga berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebesar 20,4 persen lebih tinggi daripada tahun 2019. Dengan kata lain, diberlakukannya kebijakan program Jaring Pengaman Sosial PEN melalui program bantuan modal usaha dari Presiden serta bantuan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan Pemkot Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai upaya memberdayakan UMKM di masa pandemi COVID-19 ini, maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap melalui unit usaha UMKM tersebut mencapai 186.217 orang (159.920 pada unit usaha mikro dan kecil, serta 26.297 orang pada unit usaha menengah).

Berdasarkan uraian data capaian perkembangan UMKM di Kota Palembang pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan program Jaring

Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) PEN melalui program bantuan modal usaha dari Presiden serta bantuan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan Pemkot Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah efektif dalam memberdayakan unit usaha UMKM di masa pandemi COVID-19.

Kebijakan program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) PEN mampu berkontribusi positif terhadap keberlangsungan hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Palembang. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatkan jumlah unit usaha, modal kerja dan investasi (aset) serta omzet baik pada unit UMKM usaha mikro dan kecil maupun unit usaha menengah. Kontribusi yang paling menggembirakan melalui pemberdayaan unit usaha UMKM tersebut adalah jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sangat tinggi yakni mencapai 186.217 orang (159.920 pada unit usaha mikro dan kecil, serta 26.297 orang pada unit usaha menengah). Artinya, penerapan kebijakan ini mampu mengurangi tingkat pengangguran karena pekerja yang di PHK dari tempat bekerja sebelumnya akibat terjadi krisis kesehatan dan krisis ekonomi selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini.

Keberhasilan penerapan kebijakan program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) PEN melalui program bantuan modal usaha dari Presiden serta bantuan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan Pemkot Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mendukung pemberdayaan UMKM selama masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang tidak terlepas dari keberhasilan pihak pemerintah dan pihak terkait dalam menjalankan proses pelaksanaan secara efektif serta berupaya untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi semua kendala yang dapat menghambat keberhasilan program.

3.3. Proses Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam Pemberdayaan UMKM

Tidak saja bantuan dari Presiden, bagi UMKM terdampak juga menerima keringanan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan ke BPR, mempersiapkan semua data pribadi serta usaha yang dijalankan, dan mendaftar langsung ke kelurahan, kecamatan dan Dinas Koperasi.

Kasi Peningkatan KK Dinas Koperasi, Devi Anggraini, menjelaskan bahwa setelah semua data yang diperlukan ada, maka pelaku UMKM dapat langsung mendaftar ke kelurahan, kecamatan dan Dinas Koperasi.

"Syaratnya tinggal lakukan pengajuan, dengan tetap berproses, persiapan saja dan jangan takut untuk sharing ke kami (Dinas Koperasi dan UMKM)."

Hal yang serupa diutarakan salah seorang pelaku UMKM yang mengajukan kredit yakni Sdr. Syaiful, pedagang kuliner pempek, Bukit Besar Kecamatan Ilir Barat I dan Maryadi, pedagang buah-buahan, Kecamatan Ilir Timur I.

"Ternyata, syarat untuk mengajukan kredit bantuan modal tanpa bunga dan agunan ternyata mudah dan tidak memberatkan, asalkan data-data kita ada dan lengkap sesuai yang diminta. Dan bila kita mengalami kesulitan, maka pihak kelurahan, kecamatan dan dinas akan membantu."

Kemudian petugas pelaksana survey dari pihak BPR akan melakukan survey dan melakukan pengkajian terhadap pelaku UMKM calon penerima pinjaman modal tanpa bunga dan agunan. Setelah dilakukan survey dan pengkajian, barulah pihak bank menentukan, apakah diterima. Meskipun mereka tidak memiliki BI checking tidak ada masalah.

Pengambil keputusan program Jaring Pengaman Sosial dalam pemberdayaan UMKM melalui program PEN dalam bentuk bantuan modal usaha dari Presiden, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang akan dilaksanakan melibatkan aparat pemerintah, BUMN, serta masyarakat pelaku usaha UMKM di Kota Palembang.

Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui program PEN Jaring Pengaman Sosial berupa bantuan modal dari Presiden dan bantuan keringanan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan saat ini.

Evaluasi pemberdayaan UMKM yaitu menggunakan evaluasi formatif yang dilakukan setiap kegiatan, setelah kegiatan dilaksanakan pemberdaya memberikan pengarahan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan biasanya berupa umpan balik atau tanya jawab.

Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM akan ditindaklanjuti, tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan cara menjual produk ke wisatawan maupun online atau diikutkan ke pameran. kegiatan pengembangan sistem pendukung usaha UMKM mengenai promosi produk UMKM dengan Memfasilitasi keikutsertaan KUMKM dalam pameran baik di Kota Palembang maupun diluar Kota Palembang sebagai sarana promosi produk-produk KUMKM dari Kota Palembang. Dengan adanya pemberdayaan diharap warga lebih berdaya, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam Pemberdayaan UMKM

Faktor yang mendukung dalam kegiatan pemberdayaan adalah dukungan sosial budaya seperti adat istiadat dan norma-norma, dukungan dari Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan UKM. Kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari pemerintahan sampai perusahaan swasta, sarana dan prasarana yang cukup mendukung, sumber daya manusia yang memadai dan motivasi diri dari dalam maupun luar sangat diperlukan untuk membangunkan jiwa semangat anggota.

Selanjutnya faktor yang menghambat di antaranya pertama, ilmu pengetahuan merupakan faktor penghambat dalam jalannya pemberdayaan, karena ada beberapa warga yang masih gagap teknologi untuk mengetahui tentang sistem berwirausaha modern yang lebih mudah dan efisien. Hal ini menyebabkan pemberdaya sulit untuk membuat anggota untuk berani berinovasi menyesuaikan perkembangan masa kini. Kedua, tidak seluruh UMKM menerima informasi terkait program kebijakan, artinya informasi mengenai dana bantuan ini tidak diterima oleh keseluruhan usaha mikro kecil terlebih mereka yang tidak memiliki akses dan fasilitas memadai. Dan ketiga, Dinas Sosial menerima data UKM dari kecamatan masing-masing daerah yang ada di Kota Palembang, dari data UKM yang mengajukan bantuan melalui kecamatan belum mewakili keseluruhan pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan bantuan karena tidak mendapatkan informasi pelayanan yang transparan dari pejabat setempat.

Pedagang kecil yang belum memiliki izin usaha terlebih mereka yang tidak menggunakan jasa perbankan untuk urusan keuangan agak sedikit kesulitan dan bahkan tidak dapat mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan langsung tersebut.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program *Social Safety Net* (Jaring Pengaman Sosial) efektif dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Palembang. Program *Social Safety Net* (Jaring Pengaman Sosial) mampu berkontribusi positif terhadap keberlangsungan hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Palembang. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelaku unit usaha, besar modal kerja dan investasi (aset), dan besar omzet unit usaha UMKM; dan mengurangi tingkat pengangguran sebagai akibat dari terjadinya peningkatan jumlah unit usaha UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang pada Masa *Covid-19* adalah ilmu pengetahuan, karena ada beberapa warga yang masih gagap teknologi untuk mengetahui tentang sistem berwirausaha modern yang lebih mudah dan efisien; tidak seluruh UMKM menerima informasi terkait program kebijakan;

dan data UMKM yang mengajukan bantuan melalui kecamatan tidak valid, sehingga belum mewakili keseluruhan pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, A., Siburian, E. M. D., & Oktiyanto, F. (2019). *Transformasi dan Inovasi menuju Indonesia Maju*. Indonesia, P. (2020). *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. Kementerian Keuangan.
- Oktareza, F. (2021). *Tahun 2020 Jumlah UKM di Sumsel Alami Lonjakan*. Sonora. <https://www.sonora.id/read/422522409/tahun-2020-jumlah-ukm-di-sumsel-alami-lonjakan>.
- Pakpahan, A. K. (2020a). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59–64.
- Pakpahan, A. K. (2020b). *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Wiyono, A. (2020). *Program Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi*. Puspensos Kemensos. <https://puspensos.kemensos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-di-tengah-pandemi>